Kondisi peradilan di Indonesia yang berasaskan peradilan yang bebas merdeka perlu dipertanyakan sekali lagi, masalahnya seringkali dalam realitas terjadi suatu putusan yang telah diputuskan oleh hakim dalam eksekusi selanjutnya mengalami banyak perubahan, dalam masalah ini kami mencoba mengangkat permasalahan di atas dengan mengadakan wawancara langsung dengan Bapak Muchsan, SH, (staff pengajar Hukum Administrasi Negara FH UGM) mengenai kondisi peradilan di Indonesia, di samping itu juga kami mencoba mengangkat tentang permasalah serta kondisi demokrasi di Indonesia

T : Begini pak, dalam tingkat banding kan sudah dimenangkan oleh pihak tempo tapi seperti dalam kasus-kasus PTUN yang sebelumnya kemenangan cenderung di pihak pemerintah, dan apabila kemenangan itu hak rakyat, biasanya dalam tingkat kasasi selalu dimenangkan oleh pihak pemerintah, bagaimana komentar bapak ?

M : Ehm.. jadi maksudnya anda punya estimate yang kurang baik, dalam arti tidak percaya sama pengadilan, jadi di tingkat pertama dan banding menang di tingkat kasasinya bakal kalah juga, begitu mungkin yaaa...?

T : Lalu menurut bapak sendiri bagaimana ?

M : Yaa... Mudah-mudahan estimate saudara itu salah, jadi kalau saya punya pendapat, bahwa bagaimanapun juga saya salut, karena disini merupakan suatu gejala bahwa kemandirian dari pengadilan sudah ada, jadi keadilan mandiri, artinya dalam hal ini betul-betul melaksanakan amanat pasal 24 dan 25 UUD '45 bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Nah kalau saudara punya estimate semacam itu saya kira

tidak berlebihan juga, saya pikir saya pun punya estimate seperti itu, sebab secara defakto seperti kasus kedungombo itu sudah menang di tingkat akhir, finalnya kalah juga, nah sebenarnya kendalanya cuma satu kalau saya menilai, disitu terjadi kolusi antara eksekutif dengan yudikatif, saya kira kalau tidak ada kolusi (murni) pasti ia akan berpegang teguh pada obyektifitas yaitu keadilan. Tapi saya juga mengeri sebab belum-belum surat kabar sudah mengatakan bahwa jaksa agung sudah siap-siap membikin memori kasasi. Berarti disini MENPEN akan diwakili oleh jaksa agung. Padahal kita tahu Jaksa agung setingkat dengan MA sehingga saya kuatirkan dan mudah-mudahan kekuatiran ini enggak terjadi adalah adanya kolusi. Kalau sudah terjadi kolusi ini lebih berat adanya mafia peradilan. Ini jelas sebab bagaimanapun juga terjadi kolusi berarti lembaga peradilan masih bisa disetir, masih bisa dikendalikan oleh eksekutif, ini khan memprihatinkan. Sebab negara kita sudah jelas negara hukum, berarti rule of law, hukum itu harus super jangan sampai hukum itu hanya sebagai instrumental, tapi harus merupakan sentral.

T : Sekarang kalau dilihat asas hukum memang asas peradilan itu bebas dan tidak terikat, tapi di Indonesia ada kecenderungan ada pengaruh juga. Seperti diangkatnya seorang hakim menjadi PNS berarti ada campur tangan eksekutif. Menurut bapak bisa enggak Indonesia mewujudkan sebuah peradilan yang bebas dan benar-benar tidak terikat ?

M : Bisa, saya kira bisa, maka itu sebetulnya menurut saya asalkan kita benar-benar komitmen dengan orde baru, saya kira enggak akan seperti ini. Maksudnya komitmen orde baru yang saya garis bawahi, orde baru adalah suatu tatanan hidup yang akan melaksanakan UUD secara

murni dan konsekwen. Jadi kalau betul-betul melaksanakan itu saya kira pengadilan yang seperti itu enggak ada. Maksud saya begini UUD '45 kongritnya pasal 24 dan 25 itu sudah bagus sekali disitu dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Nah hanya saja disini ada pasal yang mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman diatur dengan Undang-Undang, lalu lahirlah UU No 14 / 1970, nah justru UU No 14/ 70 inilah yang kalau diuji dengan UU mestinya tidak benar, karena dalam UUD minta bebas dan merdeka, tapi UU yang melaksanakannya justru memberikan kesempatan terjadinya pengaruh eksekutif terhadap yudikatif. Sebab hakim disamping berstatus sebagai PNS juga bertanggung jawab terhadap mentri, padahal mentri kan eksekutif, jadi saya pikir bukan UU dasarnya tapi UU pelaksananya. Maka itu betul kalau kelemahannya di Indonesia ini enggak ada lembaga yang berhak menguji UU. Kalau ada judicial review hak menguji UU, UU yang tidak sesuai dengan UUD semuanya bisa di uji, bisa didrop, tapi karena disini enggak ada sehingga disini berlaku UU enggak bisa di ganggu gugat, padahal mestinya khan tidak, UU bisa diuji dari peraturan dasarnya, jadi sekali lagi kendala di Indonesia terjadi kekuasaan kehakiman yang tidak bebas dikeranakan peraturan pelaksananya bukan UUD nya, jadi kalau anda bertanya di Indonesia apakah mungkin di Indonesia adanya peradilan yang bebas, itu mungkin saja, asal semua peraturan pelaksanya sinkron dengan UUD nya, jadi kalau UU nya B, maka peraturan pelaksanya meski B juga toh, kalau C yaa jelas enggak bisa, ini masalahnya.

T : Tapi kalau sekarang sering terjadi ada UU dihapus dengan PP, bagaimana komentar bapak ?

M : Nah inilah yang dikatakan oleh Amin Rais sebagai tauhid sosial, dia menciptakan tauhid sosial, tauhid

itu tidak hanya dalam agama, tapi ada dalam berhidup bersosial, bernegara, bermasyarakat, disinipun tauhid benar-benar dipakai, artinya kita betul-betul harus mengamalkan keadilan, jadi kalau saudara tanyakan masalah itu, itu berarti kalau saya boleh mengambil kesimpulan, kadar negara hukum kita rendah, sebab apa? salah satu ciri negara hukum adalah berlakunya Stoffen Bowe theory, artinya teori tingkatan-tingkatan peraturan, jadi negara hukum harus punya ciri itu, maksudnya tata urutan peraturan per-UU-an itu, Indonesia sudah punya, yaitu TAP MPRS No XX /1966, tapi pelaksanaannya sendiri disimpangi. Misalnya UU dihapus dengan Keppres, peraturan yang lebih rendah malah mengalahkan peraturan yang lebih tinggi. Ini Stoffen Bowe nya hilang, lebih-lebih misalnya BW, UU toh, itu cuma di gugurkan dengan SEMA, ini khan anarki dalam bidang hukum, jadi sekali lagi kami kira disini kadar negara hukumnya masih rendah, karena apa ? salah satu cirinya enggak terpenuhi, tata urutan perundangannya enggak diperhatikan, itu pertama, yang kedua, banyak peraturan hukum yang semestinya tidak boleh menurut MPR tapi lahir, misalnya Inpres, Inpres khan enggak ada dalam TAP MPR, tapi sekarang malah paling dominan, paling banyak mengatur kehidupan bernegara, ini khan merupakan kejanggalan. Berarti sekali lagi, secara de jure sebenarnya sudah cukup baik, TAP MPR nya sudah ada, tapi secara de fakto amburadul, nah ini mestinya ada lembaga kontroling untuk paling tidak memberikan peluit kalau ada penyimpangan, yaitu DPR, DPR yang harus pegang peluit kalau tiba-tiba ada UU diganti dengan Keppres, tapi sampai sekarang peluit itu tidak bunyi, nah ini masalahnya.

T : Dalam masalah Pemilu, banyak pengamat yang mengatakan bahwa Pemilu 1997 tidak banyak membawa perubahan yang

berarti dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dalam arti mungkin kepala pemerintahan tertinggi yaitu presiden masih tetap Soeharto, menurut bapak sebenarnya moment apa yang bisa mendobrak sistem demokrasi pemerintahan kita ?

M : Jadi sebenarnya kalau kita beranjak dari demokrasi tadi, mestinya kita benahi dulu ada sistem demokrasinya, jadi kalau boleh mengambil suatu analisa yang dangkal, dalam arti belum tentu betul tidaknya demokrasi di negara kita hanya formal, materialnya belum terpenuhi, maksudnya begini, kalau yang namanya demokrasi itu mestinya from the people, by the people, for the people, jadi disini rakyat tertinggi, hukum tertinggi adalah kehendak rakyat, rakyat itu dirugikan dalam DPR, tapi DPR sendiri dalam melaksanakan demokrasinya tidak sempurna, mengapa ? Ya sistemnya itu tadi, jadi bukan berarti DPR tidak berani, tapi sistemnya dibuat sedemikian rupa sehingga DPR memang sulit, misalnya saja, DPR akan melaksanakan hak inisiatif sebagai salah satu unsur demokrasi biar hukum itu dari rakyat, yaitu mengajukan RUU, caranya sistem untuk mengajukan RUU saja dipersulit, paling tidak ada 30 orang, mengumpulkan 30 orang saja sudah sulit apalagi 30 orang dari 2 fraksi, ini yang paling sulit, misalnya PDI belum tentu cocok dengan PPP. Jadi sistemnya dipersulit, jadi hak itu enggak jalan. Misalnya lagi anggota DPR kreatif, ada hak recall, siapa yang punya hak merecall, presiden, eksekutif, masak kok eksekutif berhak merecall legislatif, khan aneh, otomatis legislatif jadi takut bicara, sebab kalau mereka banyak kritik terhadap presiden palu jatuh, recall deh ! Jadi sistem dibuat sedemikian rupa sehingga impoten, lain misalnya DPR ingin angket, otomatis kalau mengadakan angket harus ada biaya, padahal anggaran itu pemerintah yang punya kunci, jadi

kalau DPR punya usul, ajukan proposal ke pemerintah terus pemerintah mempelajari, lhaa ini merugikan, jangan dikasih biaya, kalau sudah begitu, macet itu problem, nah jadi aturan-aturan permainan atau sistem seperti ini yang sebenarnya mengebiri proses jalannya demokrasi jadi seperti yang saya katakan tadi demokrasi hanya formal, ada DPR, MPR, formal ada tapi aturan permainannya dibikin sedemikian rupa, sehingga fungsi demokrasinya tidak jalan secara jelas, ada lagi permasalahan yang berhubungan dengan demokrasi tadi, sebetulnya untuk demokrasi itu khan tidak ada istilah single majority, single minority, itu enggak ada, itu istilah liberal, karena dalam voting ada istilah itu, kita khan enggak mengenal voting, bagaimana akan demokrasi kalau warna dari legislatif yang mesti mengontrol eksekutif warnanya sama, disini kuning disana juga kuning,dan yang merah dan yang hijau khan enggak berperan, jadi kalau warnanya sudah sama, khan mereka pasti serasi, artinya apa yang dikatakan disini, disana pasti oke, jadi kontrolnya enggak jalan, jadi saya pikir, tadi saudara mengatakan bahwa pemilu toh tidak akan mempengaruhi, saya kira benar, selama sistem permainannya enggak dirubah, tapi kalau diubah, misalnya DPR bisa betul-betul bisa melaksanakan haknya, recalling bukan hak presiden, tapi hak anggota DPR sendiri, saya kira keberanian mereka untuk mengeluarkan pendapat saya kira jalan, sehingga demokrasi kadarnya bisa dinaikkan.

T : Sekarang dengan adanya sistem permainan seperti yang bapak katakan tadi, lebih berakar kepada eksekutif, dalam hal ini presiden, banyak kaum intelektual, itu memandang pribadi soeharto, nah kenapa setiap kali pribadi soeharto itu dibicarakan, itu menjadi sebuah berita yang heboh, komentar bapak ?

M : Saya kira itu mungkin karena budaya, culture jawa, terus terang saja yaa.., mayoritas pemimpin kita khan orang jawa, bukan berarti saya merendahkan suku lain, tapi memang mayoritas jawa, sehingga disini budaya jawa masih dominan, nah padahal dalam budaya sendiri tidak mengenal budaya demokrasi, tapi monarki. Jawa sejak dulu berbentuk kerajaan, sehingga terjadi, saya tidak mengatakan kultus individu, tapi paternalisme, raja adalah panutan, baik formal maupun informal, sehingga apapun kata raja, sendhiko dawuh, siap melaksanakan, ini budaya jawa, sehingga dalam hal ini sampai kepercayaan yang supra natural, bahwa pimpinan itu karena wahyu, kalau enggak kemasukan wahyu enggak bakalan jadi raja, sehingga apa, wahyu itu dari tuhan, dewa, sehingga raja itu keturunan dari dewa, atau wahyu dewa, ini jenjang kepercayaan paternalisme. Nah sekarang warisannya khan masih banyak apapun yang dikatakan pimpinan harus benar, sehingga disini, tadi anda katakan individunya apa yang dikatakan pasti betul, jadi yang menonjol individu presidennya, ini terjadi karena budaya jawa itu, ini yang pertama. Kedua, adalah lamanya kita dijajah, kita dijajah 350 tahun, masih ditambah jepang dsb, akibatnya kita punya rasa takut terhadap atasan, sebab dalam penjajahan, perintah atasan kita enggak boleh ditentang, ini yang masih membekas, ada sosiolog Amerika mengatakan bahwa mengatur bangsa Indonesia itu mudah, karena ia akan selalu mengikuti paternalisme, jadi kalau saya simpulkan ada dua faktor, faktor kultur yaitu budaya jawa tadi dan faktor penjajahan, ini yang menyebabkan kita mengkultuskan pimpinan kita.

T : Sebagaimana dikatakan Faisal tanjung bahwasannya selain orsospol yang ada, masih ada juga kelompok -kelompok lain yang turut mempengaruhi kebijakan pemereintah seperti konservatif, moderat, dan radikal,

komentar bapak mengenai kelompok radikal yang diprediksikan akan membawa babak baru dalam mendobrak kepemimpinan dalam pemerintahan ini ?

M : Haa...haa.., sebenarnya saya harus hati-hati dalam menjawab masalah ini, apalagi anda tadi menggunakan istilah mendobrak, salah-salah nanti bisa seperti Bintang, ha...haa..., Jadi sebenarnya disini, saya belum menjawab pertanyaan anda. Saya hanya punya sebuah analisa, kelestarian suatu bangsa atau organisasilah, itu akan tergantung pada penciptaan kaderisasi, kalau penciptaan kader itu lambat atau katakanlah penciptaan kaderisasi itu enggak ada yakinlah itu organisasi itu akan hancur, sebab kehilangan kader, jadi misalnya kalau saya jadi rektor lalu enggak ada orang lain yang bisa jadi rektor, saya tidak menciptakan kader, bahaya universitas ini, begitu saya turun, enggak ada orang yang bisa, universitas kita amburadul, karena kadernya lambat, bukti sejarah misalnya hancurnya Majapahit itu karena seorang Gadjah Mada, Gadjah Mada lambat membuat kader, sehingga begitu ia turun, enggak ada kader seukuran dia. FH UGM zaman saya dulu, 22 guru besar, profesornya 22, tapi guru besar waktu itu enggan mengangkat asisten, baru ia pensiun ia mengangkat III/a, ia meninggal kadernya masih "iyik-iyik", apa yang saudara hadapi sekarang, guru besar bisa dihitung dengan jari, kalah dengan sospol, kalah dengan yang lain, jadi kaderisasi itu penting, saya melihat bahwa kaderisasi itu yang paling baik itu di tubuh ABRI, begitu misalnya seorang Pangdam berhenti, muncul kader baru dan lebih baik atau katakanlah paling tidak setingkat dengan pangdam lama, jadi kewajiban dari seorang pemimpin adalah menciptakan kader-kader baru, sehingga disini bisa saya analog, sebagai presiden berhasi kalau sebelumnya presiden itu sudah

menciptakan kader-kader baru, soal pak Harto saya salut artinya dia berhasil dalam bidang pembangunan, apapun yang bisa kita lihat secara de fakto listrik masuk desa misalnya, pembangunan berhasil, tapi seandainya beliau tidak menjabat, lalu kadernya belum siap, apakah pembangunan bisa lestari, sebagai kesimpulan saya, seorang pimpinan berhasil adalah pimpinan yang bisa menciptakan kader, sehingga dalam hal ini, kalau pak Harto enggak mau menciptakan kader itu juga pimpinan yang kurang berhasil, mestinya hilang satu tumbuh seribu toh, ini sinyalemen saya, sekarang saya kaitkan dengan pertanyaan saudara, jadi disini ada kelompok radikal yang menurutnya katanya akan mendobrak kami kira, menurut saya itu yang namanya suksesi ataupun penggantian yang di Indonesia yang penting suksesi sistem, orangnya silahkan, bagi saya, orang itu no problem, bagi saya orang itu ibarat sopir, yang penting khan kendaraannya, kalau kendaraannya sehat, semua ornamen instrumennya berjalan baik, meski sopirnya enggak kualified bakalan selamat. Tapi meski punya SIM B-29 kalau mesinnya rusak pasti akan tertipu, jadi menurut saya masalah suksesi dsb, kader cukup banyak, dan cukup mampu, sistemnya yang harus diubah, sebab kalau sistemnya tetap seperti ini ya untuk apa, ini penting untuk golongan radikal, jadi bagi saya yang penting suksesi sistem, jadi misalnya ada pernyataan bahwa beberapa anggota DPR di angkat bukan dipilih sistem demokrasi rusak, sebab dengan adanya yang diangkat, orang yang diangkat otomatis kiblatnya pada yang mengangkat jadi bukan pada kepentingan rakyat, ini contoh sistem. Sitem peradilan, selama UU No 14 / 1970 tetap berlaku hakim enggak bakalan merdeka dan bebas, jadi kalau menurut hemat saya, kalau radikal mau mendobrak, dobrak sistemnya dulu, enggak perlu mikir siapa yang jadi, karena kadernya cukup banyak dan mampu. Jadi

oknumnya enggak penting.

T : Mengambil sinyalemen dari bapak tadi, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Soeharto telah menciptakan kader-kader untuk membentengi diri, Nah disini adakah indikasi bahwa boroknya akan terbongkar ?

M : Wah ini sudah terlalu jauh, yang tahu pak Harto sendiri, jadi yang jelas secara teori ada suatu dalil yang diangkat oleh Montesquieu, the increasing nature of the power, jadi hakekat hukum alam mengatakan bahwa setiap kuasa selau ingin membengkakkan diri, jadi power secara alam akan menambah kekuasaan , jadi enggak kekuasaan yang akan memperkecil kekuasaannya ini hukum alam, jadi dalam hal ini kalau seorang presiden menanam orang-orang yang memperkuat dirinya, itu wajar, seorang dekan di pilih enggak akan memilih wakil-wakilnya yang enggak akan memperkuat dirinya, enggak mungkin dia akan memilih golongan oposisi, yang pasti, dia akan memilih yang sejalan, ini wajar. Nah sekarang untuk mengimbangkan kewajaran itu yang diperlukan adalah lembaga kontroling, atau pengawas, jadi untuk jangan terlalu membengkak, lembaga pengawas ini dihidupkan, jadi kalau dikatakan di negara kita terjadi arogansi, saya enggak setuju, arogansi khan kekacauan, tapi disini adalah melemahnya lembaga, baik administratif, yudikatif, maupun politik, sehingga membengkaknya kekuasaan semakin enggak terkontrol, jadi analisa saya karena melemahnya lembaga pengawasan tadi.

T : Menurut bapak lembaga pengawasan itu apa wujudnya ?

M : Pengawasan politik bisa oleh DPR , MPR, bayangkan MPR hanya bersidang satu kali dalam setahun, bagaimana mau mengawasi dengan baik. DPR sebagai lembaga pengawas

dengan yang diawasi mestinya lebih pintar yang mengawasi, saudara tahu, bahwa yang diawasi itu mentri-mentri, profesor, doktor, ahli-ahli. Yang mengawasi anggota DPR kita bisa melihat, jadi disini dibuat sedemikian rupa sehingga seolah-olah mutu anggota DPR kurang seimbang dengan yang diawasi, kalau saudara mengawasi saya ya.. sulit, saya khan dosen anda mahasiswa, mestinya saya yang mengawasi saudara, nah ini tidak dilakukan pengawasan pokitik, pengawasan administratif, ini pengawasan dari atas ke bawah, pengawasan melekat, sekarang waskat ini sudah seperti lingkaran setan, maksudnya bagaimana akan mengawasi dibawah kalau yang diatas tidak memberikan contoh yang baik, misalnya, ini rahasia umum kalau mau jadi PNS harus bayar, untuk jadi kades harus banyak keluar uang, padahal sifat orang kalau sudah keluar uang khan ingin kembali, jadi kalau sudah jadi (maaf) jaksa pada waktu mau jadi jaksa khan harus bayar, otomatis ketika ia jadi jaksa ia juga harus dibayar, selama atas enggak bersih, otomatis yang bawah enggak bersih. Pengawasan yudikatif berarti pengawasan lembaga peradilan lemah juga, karena UU nya peraturannya memberikan kesempatan terjadinya kolusi dengan pihak lain. Jadi lembaga pengawas dari ketiganya melemah, apa sebab ? kembali kepada sistem, aturan permainannya memang memungkinkan sekali untuk terjadi kelemahan, jadi kalau sistemnya yang dirubah, mungkin akan terwujud kekuatan dalam bidang kontrol, terjadinya eksekutif superiority itu karena pengawasan melemah. Tapi kalau di Amerika kebalikannya, yudikatif superiority, yudikatif menonjol karena kekuasaannya penuh, dia bisa menguji setiap setiap peraturan yang bertentangan dengan UU dasarnya, di Indonesia kekuasaan ini enggak ada, jadi ya.. itu tadi, adanya peraturan yang enggak sesuai dengan UU dasarnya tetap berlaku, inilah lemahnya lembaga kontroling.

T : Sekarang sistem militer sudah masuk dalam bidang politik, ekonomi, budaya dan seluruh aspek kehidupan masyarakat, sebenarnya sejak kapan ini terjadi ?

M : Ya.. sejak berlakunya fungsi ABRI, sebenarnya sebagai kekuatan militer, ABRI juga sebagai kekuatan sosial, selain itu, juga karena ada singkronisasi dengan GOLKAR.

T : Dalam realitasnya, mengapa ormas dari kalangan moderat ICMI, PCPP dan sebagainya lebih banyak mempengaruhi kebijakan pemerintah daripada orsospol itu sendiri, padahal, yang semestinya mempengaruhi kebijakan pemerintah itu khan orsospol ?

M : Kalau ini benar-benar terjadi, berarti disini merupakan kelemahan dari orsospol itu sendiri, sebab begini yang namanya parpol itu harus bisa mempengaruhi pemerintah, bahkan ia dapat merebut kekuasaan itu dalam arti kata semua policy dari parpol bisa jadi policy pemerintah, tapi sekarang terbalik, orsospol kebanyakan policynya kalah dengan ormas, ini yang pertama, karena melemahnya orsospol, problemnya adalah mengapa melemah . Ini ada dua faktor. Intern dan Ekstern. Meskipun keduanya berkait. Misalnya yang Intern, mana orsospol yang tidak cakar-cakaran di dalam. NU saja yang bukan orsospol diganggu penyakit itu. Tapi sebenarnya bisa kita kaitkan. Pecahnya atau cakar-cakarannya ini memang asli dari dalam atau ekstern. Atau memang dibikin dari luar. Katakanlah kita akan terkejut, misalnya pemerintah kan sebenarnya harus berpegang pada konstitusional sehingga apapun yang konstitusianal itu betul. Sekarang PDI pimpinan Megawati itu yang konstitusional, berarti yang lain itu yang in-konstistusional, sehingga mestinya jangan

diberi apapun, minta izin rapat ya.. jangan diberi, kenapa ini kadang ini masih bisa bergerak, ini khan faktor ekstern bisa masuk, akibatnya tidak menyelesaikan konflik intern, tapi malah menambah parah, karena mereka berkecimpung dalam bidang ini terus akibatnya, tidak bisa mensuplai policy -policy pada pemerintah, ini yang pertama, yang kedua, kualitas, yang namanaya ikatan cendikiawan ini penuh dengan ide-ide, teori, dan pendapat sehingga harus universal, artinya demi kepentingan rakyat, sehingga ide-ide dari para cedekiwan itu karena universalnya bisa dan harus diterima oleh pemerintah, tapi kalau orsospol khan untuk golongan kepentingan sendiri, nah ini mungkin saja, karena saya sendiri enggak termasuk orsospol ataupun cendekiawan.

T : Mengenai kemelut di PDI apakah ada rekayasa pemerintah atau orsospol tertentu untuk membiarkan konflik di PDI terus berlanjut ?

M : Saya kira anda sudah tahu jawabannya toh !

T : Maksud saya komentar bapak mengenai pertanyaan saya.

M : Kalau saya sih tidak sejauh itu ya, yang jelas menurut saya mestinya semuanya konsisten bahwa PDI itu asset nasional, sehingga bila terjadi penyakit di PDI misalnya semuanya baik pemerintah maupun orsospol harus membantu, paling tidak menyelesaikan kemelut itu jangan malah membuat lebih besar, jadi kalau saya komitmennya adalah konsisten, berilah mereka semacam terapi supaya mereka dapat menyelesaikan masalahnya dengan demikian saudara bisa menyimpulkan saya punya estimate bahwa ada yang enggak konsisten enggak mau membantu. Okelah kalau enggak mau membantu, tapi netral aja, jangan malah membuat lebih besar, kalau

diminta apakah ada ekses dari luar dan sebagainya saya kira no comment. Hanya saya katakan bahwa ada pihak-pihak yang tidak mau membantu, padahal itu asset nasional harus diselamatkan, mestinya kita bantu, ada yang enggak mau bantu artinya alasannya apa enggak tahu, diam saja, padahal inkapasitas dia mampu.

T : Saat ini banyak bermunculan ormas-ormas baru dengan pendirinya dari angkatan lama katakanlah seperti PNI baru, Masyumi dan lain-lain, apakah berdirinya ormas-ormas diatas dapat membahayakan stabilitas politik di Indonesia ?

M : Saya kira bisa saja itu membahayakan, tapi kita harus melihat dari kacamata yang lain, dari segi positifnya, itu khan kemajuan demokrasi di Indonesia, artinya demokrasi di Indonesia mulai transparan, artinya memetingkan aspirasi rakyat daripada aspirasi penguasa, dan saya cenderung mengatakan itu baik, dari pada adanya GOLPUT, dibikin 3 tapi tetap enggak mau, ini bahaya, sebab GOLPUT itu orang-orang apatis, karena merasa aspirasinya merasa tidak tertampung dalam suatu parpol atau ormas apapun. Dengan timbulnya ormas-ormas ini orang-orang yang dulunya enggak tertampung aspirasinya, sekarang bisa masuk dalam menentukan policy, tapi kalau GOLPUT khan penghambat, salah-salah bisa menjadi oposisi. Ormas-ormas ini adalah embrio demokrasi hanya saja untuk menanggulangi kekhawatiran anda tadi sekali lagi adalah pengawasan, jadi adanya neo-neo tadi lebih-lebih neo PKI otomatis pemerintah harus tegas, sehingga saya pendapat dengan pendapat Faisal Tanjung bahwa litsus untuk anggota DPR perlu, kalau Rudini khan tidak, kalau saya setuju, apa sebab, manusia itu enggak langgeng, bisa saja yang dulu Islam, sekarang murtad, yang dulunya bukan PKI sekarang PKI, Nah dengan litsus yang temporer ini,

saya pikir neo-neo tadi akan cepat konangan terutama yang akan merusak pemrintah, yang diutamakan disini adalah litsus pada legislatif sebagai pembawa aspirasi rakyat.

T : Pada kondisi seperti saat ini kita memerlukan issue hukum untuk mengantisipasi keadaan dimasyarakat, bagaimana menurut bapak ?

M : Betul, sebab tujuan negara itu adalah adil makmur, adilnya diutamakan dulu, makmur yang enggak adil, enggak kita harapkan, padahal untuk menciptakan adil sarananya khan hukum, tanpa hukum enggak berhasil, nah kenapa sekarang pembangunan berbelok, sebagai contoh soko guru perekonomian menurut UUD adalah koperasi, tapi sekarang yang lahir malah konglomerat, koperasi hanyalah anak angkat konglomerat, ini khan menyimpang, kenapa, hukumnya yang enggak dipegang, jadi disini issue hukum itu penting sekali, dalam arti kata dapat meningkatkan perhatian pemerintah terhadap keamburadulan hukum, seperti issue kemelaratan adalah untuk mengundang perhatian masyarakat bahwa kemalaratan itu betul-betul ada, issue hukum juga harus mengundang perhatian pemerintah bahwa pelaksanaan hukum benar-benar amburadul.

T : Mungkin bapak bisa memberikan contoh kongrit mengenai issue hukum tersebut ?

M : Begini, sekarang ini khan demokrasi semua sudah ada, ada demokrasi ekonomi, ideologi, dan lain-lain, ini karena negara kita adalah negara demokrasi, jadi demokrasi harus menjelajah kemana-mana, hanya satu yang belum, yaitu demokrasi hukum, artinya transparasi pembuatan hukum, rakyat belum bisa mengontrol, misalnya ada UU lalu lintas berlaku, kemudian ada

seorang anggota DPR yang mengatakan bahwa anggota DPR tersebut belum menyetujui mengapa bisa berlaku, disini mana demokrasi hukumnya, jadi demokrasi hukum ini perlu sekali, pertama transparasi dalam pembuatan hukum, dan kedua mengenai pengujian, jadi kita tidak menggunakan dalil bahwa UU tidak bisa diganggu gugat, saya kira itu yang bisa diangkat sebagai issue hukum.

Reporter : by Tanty & Fredy
Tanggal : 24 November 1995